

**1\O6514=U74FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 1996-2011**

**JURNAL**



**Oleh :**

**Nama : Wien Dipatiguna**

**Nomor Mahasiswa : 09313059**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah**

**Daerah DIY Tahun 1996-2011**

**Wien Dipatiguna**

**wiendipatiguna@rocketmail.com**

### **Abstrak**

Dalam melahirkan tata kelola pemerintahan di Indonesia masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengelola daerahnya masing-masing. Menurut Hariyanto (2005) kebijakan desentralisasi menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia. Menurut halim dalam rahmawati (2010) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Pengeluaran Daerah (1) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Pengeluaran Daerah (2) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengeluaran pemerintah daerah setiap tahunnya semakin meningkat.

Dalam penelitian ini, model pengeluaran pemerintah daerah DIY di estimasi dengan menggunakan OLS. Dengan periode pengamatan 16 tahun dari 1996-2011. Penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, seperti uji t, uji F, uji asumsi klasik.

Hasil analisis dari penelitian ini, semua variabel independen (PDRB konstan perkapita, PAD dan dana perimbangan) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah DIY dan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh signifikan.

**kata kunci** :*pengeluaran pemerintah daerah DIY, PAD, PDRB konstan perkapita, dana perimbangan.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam melahirkan tata kelola pemerintahan di Indonesia masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengelola daerahnya masing-masing. Menurut Hariyanto (2005) kebijakan desentralisasi menjadi pilihan baik di negara

maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia.

Adanya kebijakan baru tentang otonomi daerah didasari oleh kehendak daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing, kebijakan ini dilandasi oleh dikeluarkannya dua undang-undang di bidang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk pengelolaan daerah. Akan tetapi kebijakan ini akan berdampak terhadap kesenjangan setiap daerah karena beberapa daerah memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Disatu sisi banyak daerah yang tidak memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, akibatnya daerah ini kesulitan dalam melaksanakan desentralisasi otonomi daerah.

Menurut halim dalam rahmawati (2010) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses

penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan) (Dedi Haryadi 2001 dalam Syarifah Arieva 2013).

Pengeluaran Daerah (1) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Pengeluaran Daerah (2) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pengeluaran pemerintah daerah setiap tahunnya semakin meningkat. Belanja barang jasa merupakan pengeluaran tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak membeli barang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak serta pengadaan barang untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, diantaranya PAD, PDRB perkapita dan dana perimbangan. Masing-masing variabel sangat berperan dalam menambah pendapatan daerah sehingga pendapatan tersebut digunakan pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah.

## **RUMUSAN MASALAH**

Selanjutnya dari berbagai kondisi yang ada di DIY tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah daerah DIY. DIY merupakan daerah istimewa yang sangat menarik untuk diteliti tentang pengeluaran pemerintah daerah, apalagi ditambah dengan adanya undang-undang keistimewaan. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah faktor-faktor seperti PAD, PDRB konstan perkapita dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah DIY.

Studi empiris tentang pengeluaran pemerintah, banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti :

Tabel 1 studi empiris

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Ridho Argi dan Dr Hadi Sasana, SE, Msi	Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jateng Periode 2004-2009	Penelitian ini menggunakan analisis panel data. Analisis panel data adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (timeseries) dengan data antar individu (cross section).	Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD memberikan pengaruh yang positif signifikan (pada $\alpha=5\%$ ) terhadap belanja daerah. Kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Setiap kenaikan tingkat sebesar 1 miliar akan meningkatkan 1,50 miliar belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
2	Askam Tuasikal	Pengaruh DAU, DAK PAD Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda	Menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan belanja modal, tidak terlalu mempertimbangkan PDRB sebagai salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal, rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.

3	Gregorius N Masdjojo dan Sukartono	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jateng Tahun 2006-2008	Data penelitian PAD, DAU, DBH, DAK dan BD kabupaten / kota di Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan proses pengolahan dengan sistem data panel (pooled data).	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
---	------------------------------------	--	--	---

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$X_1$  adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  adalah PDRB konstan perkapita

$X_3$  adalah Dana Perimbangan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu (*time series*) selama 16 tahun dari 1996 – 2011. Data sekunder ini diperoleh dari BPS yang diolah dari berbagai tahun.

### Variabel

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran Daerah (1) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).

Pengeluaran Daerah (2) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan).

## **2. Variabel Independen (X)**

Ada beberapa variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain adalah:

### **1. PAD (X1)**

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **2. PDRB Konstan Perkapita (X2)**

PDRB Konstan Perkapita adalah PDRB konstan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah.

### **3. Dana Perimbangan (X3)**

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **Metode Analisis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda merupakan metode statistika yang dipakai untuk mengetahui pola hubungan antar variabel. Untuk menilai apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai (memiliki error terkecil), dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis diantaranya adalah uji t, uji F serta uji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi

## **ANALISIS DATA**

Penelitian ini menggunakan uji Mc Kinnon, White dan Davidson atau yang lebih dikenal dengan uji MWD. Model ini bertujuan untuk memilih antara model

regresi linier dan model regresi log linier sehingga mendapatkan hasil regresi terbaik. Hasil dari uji MWD sebagai berikut :

Tabel 2

Uji MWD

Variabel	Nilai prob	Keterangan	Model
Z1	0.1286 > 5%	Gagal menolak hipotesis nol	Linier
Z2	0.1244 > 5%	Menerima hipotesis alternative	Log Linier

Sumber: data skunder diolah

Berdasarkan tabel di atas hasil estimasi nilai  $Z_1$  dan  $Z_2$  tidak signifikan. Menggunakan derajat kepercayaan 95% ( $\alpha = 5\%$ ) bentuk fungsi linier dan log linier sama-sama baik. Model regresi yang digunakan adalah fungsi log linier, karena nilai R- Square lebih tinggi log linier dibanding linier.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.3

Hasil uji klien dapat dilihat dalam tabel berikut :

$R^2$  model utama 0.987813

Regresi klien	R2 parsial	Ket
X1 dengan X2 X3	0.967002	Tidak multiko
X2 dengan X1 X3	0.832110	Tidak multiko
X3 dengan X1 X2	0.939823	Tidak multiko

Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan uji Klien maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas. Karena semua koefisien determinasi regresi auxiliary lebih kecil dari koefisien determinasi regresi asli maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.



## Uji Heterokedastisitas

Tabel 3

### Uji White

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.367397	Prob. F(6,9)	0.322830
Obs*R-squared	7.630039	Prob. Chi-Square(6)	0.266479

Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji white maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena  $\text{Obs} \cdot \text{R-squared} < \text{chi-square tabel}$  ( $7.630039 < 12.59$ ).

## Uji Autokolerasi

Tabel 4

### Uji LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.503464	Prob. F(2,10)	0.618970
Obs*R-squared	1.463700	Prob. Chi-Square(2)	0.481018

Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan hasil uji autokolerasi dengan menggunakan uji LM maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokolerasi. Karena nilai  $X^2$  (*chi square*) hitung sebesar 1.463700 sedangkan nilai  $X^2$  (*chi square*) tabel sebesar 5.99 pada df 2 dan  $\alpha=5\%$  maka berdasarkan uji LM model ini tidak mengandung autokolerasi

## Uji Secara Individual Jangka Pendek (uji t)

- Uji t terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk nilai t tabel uji satu sisi dengan derajat kebebasan 12 dan  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh nilai sebesar 1.78 sedangkan untuk nilai t-hitung sebesar 5.862090.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat diketahui bahwa t-hitung  $>$  t-tabel, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti secara individu PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti ketika PAD mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0.822215%.

b. Uji t terhadap PDRB konstan perkapita di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk nilai t tabel uji satu sisi dengan derajat kebebasan 12 dan  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh nilai sebesar 1.78 sedangkan untuk nilai t-hitung sebesar 2.661070.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat diketahui bahwa t-hitung  $>$  t-tabel, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti secara individu PDRB konstan perkapita di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti ketika PDRB konstan perkapita mengalami kenaikan sebesar 1 % maka pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1.335172%.

c. Uji t terhadap Dana Perimbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk nilai t tabel uji satu sisi dengan derajat kebebasan 12 dan  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh nilai sebesar -2.179 sedangkan untuk nilai t-hitung sebesar -1.821446.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat diketahui bahwa t-hitung  $<$  t-tabel, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti secara individu Dana perimbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Uji Statistik F

Dari hasil estimasi diperoleh F hitung sebesar 324.2102 dan nilai F tabel dengan  $\alpha = 5\%$  adalah 3.49 karena F hitung lebih besar dari F tabel maka menolak  $H_0$  artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

### Koefisien Determinasi

Hasil dari estimasi model log linier menghasilkan  $R^2$  sebesar 0.987813 artinya bahwa 98.78% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 1.22% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## **KESIMPULAN**

Variabel PAD di D.I Yogyakarta berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah DIY. Variabel PAD sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara PAD dan pengeluaran pemerintah daerah DIY. Ketika PAD naik maka penerimaan pemerintah juga meningkat sehingga pengeluaran pemerintah akan meningkat juga. Menurut Peacock dan Wiseman, meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Variabel PDRB konstan perkapita berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah DIY. Variabel PDRB konstan perkapita sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara PDRB konstan perkapita dan pengeluaran pemerintah daerah DIY. Ketika PDRB perkapita naik maka pengeluaran pemerintah juga akan naik, karna pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan dsb. Hal ini senada dengan yang di sebutkan Wagner bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini bisa dilihat pada kondisi empiris DIY. Pada tahun 2009 PDRB perkapita sebesar Rp 5.855.379 naik menjadi Rp 6.086.507 pada tahun 2010 dan pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan dari Rp. 1.327.487.848 ribu tahun 2009 menjadi Rp 1.394.446.100 ribu pada tahun 2010.

Variabel Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah DIY. Hal ini dikarenakan Karena Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mandiri dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah lebih banyak didanai oleh PAD dan PDRB.

## **Implikasi**

Ada beberapa implikasi yang diperoleh dari dari penelitian ini, yaitu :

1. Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Agar tidak terjadi penyelewengan dan pemerintah daerah lebih memperketat regulasi pajak kendaraan. Karena dapat kita ketahui bahwa DIY merupakan tujuan utama pendidikan. Banyak mahasiswa perantauan yang bersekolah di DIY menggunakan plat kendaraan selain AB. Padahal kita ketahui pajak kendaan tersebut larinya ke daerah masing-masing. Sedangkan kendaraan tersebut digunakan di DIY, Sehingga perlunya regulasi yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian pajak daerah lebih meningkat.
2. PDRB konstan perkapita merupakan rasio perbandingan antara PDRB konstan dan jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk semakin rendah PDRB konstan perkapita. Sehingga pemerintah daerah harus memberi perhatian khusus pada peningkatan jumlah penduduk. Harus adanya program-program dalam menekan ledakan jumlah penduduk, seperti KB dll. Walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk
3. Diharapkan pemerintah daerah tidak lagi mengharapakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Sehingga dalam mendanai belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sehingga tidak ada ketergantungan terhadap pemerintah pusat, ditambah lagi dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, S A. 2013. Belanja Daerah, Proyeksi Dan Klasifikasinya. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2013 dari <http://ainiarie2012.blogspot.com/2013/02/belanja-daerah-proyeksi-dan.html>

- Argi, R & Sasana, H. Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009.
- Atmaja A E. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang  
Badan Pusat Statistik Yogyakarta, Data Diolah.
- Masdjojo, G.N dan Sukartono. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *FLYPAPER EFFECT* Kabupaten / Kota Di Jawa Tengaah Tahun 2006 – 2008.  
Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank
- Prasetya, F. 2012. Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. Universitas Brawijaya Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Tuasikal, A. 2008 Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.